

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan banyak keindahan alam. Flora, fauna dan multikulturalisme yang ada membuat Indonesia semakin unik. Potensi yang begitu besar mempengaruhi keberagaman pariwisata di Indonesia. Pariwisata adalah salah satu sektor industri terbesar di tingkat global yang saling berhubungan dengan semua sektor kehidupan lainnya, yakni ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik. Jika manajemen diterapkan dengan baik, industri pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan dan mendorong pembangunan, membuka peluang usaha baru, menciptakan peluang kesempatan kerja dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat maupun pemasukan daerah. Pariwisata merupakan andalan berbagai negara dalam menghasilkan devisa secara cepat. Pitana dan Gayatri (dalam Utami, dkk. 2021), menyatakan bahwa pariwisata sering disebutkan sebagai *passport to development, new kind of sugar, tool for regional development, invisible export, non-pollution industry*, dan lain sebagainya. Hal ini karena pariwisata memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi global.

Pariwisata mendukung pembangunan-pembangunan di setiap daerah-daerah sehingga pariwisata menjadi sektor yang penting. Seluruh daerah berupaya mengembangkan sektor pariwisata berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki. Industri sektor pariwisata di Indonesia merupakan suatu aspek potensial yang dilakukan dengan meningkatkan keamanan, melaksanakan perbaikan infrastruktur

dan pengelolaan yang efektif sehingga menciptakan industri sektor pariwisata yang diminati wisatawan dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan memberikan pengalaman yang memuaskan maka akan menciptakan keinginan untuk berwisata kembali dan akan menimbulkan pengaruh positif bagi penduduk lokal dan negara secara keseluruhan.

Unsur-unsur pariwisata menurut Kurniawan (dalam Motos, dkk., 2015) adalah atraksi, transportasi, akomodasi, fasilitas dan infrastruktur yang masih merupakan bagian dari aktivitas pariwisata. Industri sektor pariwisata menjadi sumber utama devisa negara karena Indonesia memiliki berbagai jenis pariwisata yang tersebar di setiap daerah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, seperti wisata alam, wisata sosial maupun wisata budaya (Mashudi & Fauziah, 2019). Beragam budaya dapat ditemukan di berbagai lokasi pariwisata di seluruh wilayah Indonesia yang dapat memikat perhatian wisatawan asing maupun wisatawan lokal sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. Banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata yang unggul.

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi guna membangun daerahnya. Undang-undang tersebut membawa pengaruh terhadap peningkatan tanggung jawab dan tuntutan untuk mengeksplorasi serta mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya, khususnya sumber daya pariwisata yang dimiliki setiap wilayah dalam rangka mendukung

proses pembangunan di daerah. Besarnya potensi pariwisata di daerah disadari oleh pemerintah dan *stakeholder* kepariwisataan sehingga berusaha digali, dikembangkan serta membangun aset objek wisata dan daya tarik wisata yang menjadi awal dari aktivitas pariwisata.

Menurut Charles dan Larry (dalam Mashudi dan Fauziah, 2019) tingkat perencanaan kepariwisataan dimulai dengan pengembangan pariwisata daerah meliputi atraksi wisata dan pembangunan sarana prasarana. Muncul dan berkembangnya kegiatan pariwisata karena adanya hal-hal baru yang memiliki karakteristik unik dari daerah tersebut sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Pariwisata memiliki esensi keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keragaman dan lokalitas sehingga menarik banyak orang untuk berwisata.

Pengembangan pariwisata memerlukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi kepariwisataan dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut. Pengembangan pariwisata di suatu daerah harus didasarkan pada perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif dan pengembangan yang terarah sehingga potensi yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tahap awal pengembangan pariwisata diawali dengan inisiasi dan komitmen tegas pemerintah daerah untuk memandu rencana pengembangan pariwisata dengan secara aktif melibatkan masyarakat lokal sebagai penerima layanan jasa maupun penyedia layanan jasa. Pengembangan pariwisata dapat

meningkatkan kegiatan bisnis dan dapat membawa manfaat sosial, budaya dan ekonomi yang signifikan bagi suatu daerah. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik maka pariwisata dapat membawa suatu manfaat bagi masyarakat setempat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, pembangunan dan pengembangan pariwisata hanya akan menghasilkan produk pariwisata yang memiliki dampak minim bagi masyarakat dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengembangan kepariwisataan daerah terdiri dari penekanan kebijakan pembangunan berdasarkan karakteristik unik daerah yang berkaitan dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (Jaenuddin, 2019). Oleh karena itu, pariwisata bisa dipandang sebagai suatu sektor yang memegang peranan penting dalam pengembangan kualitas daerah. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Industri pariwisata terdiri dari beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam produksi, pemasaran produk pariwisata, pengembangan serta layanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata sehingga berdampak positif pada aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Pengembangan pariwisata memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan tentang kesejahteraan masyarakat jika dikembangkan secara profesional (Mashudi dan Fauziah, 2019). Oleh karena itu, untuk mendorong pengembangan pariwisata diperlukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sehingga menciptakan hubungan yang kuat antar

pemangku kepentingan dan mendapatkan hasil positif untuk kemajuan pengembangan industri pariwisata.

Dalam mendukung keberlangsungan pengembangan pariwisata, terdapat beberapa faktor pendukung yang sangat penting, salah satunya adalah infrastruktur. Infrastruktur menurut Evita dan Sunartha (dalam Meutia & Rizal, 2022) adalah keseluruhan fasilitas fisik maupun non fisik yang dibangun untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam aspek ekonomi dan sosial. Beberapa hal berikut termasuk infrastruktur pariwisata meliputi fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, seperti akomodasi seperti akses jalan, penginapan, transportasi, air bersih, restoran dan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, infrastruktur pariwisata harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas destinasi pariwisata sehingga memberikan atraksi yang unik dan menarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga pariwisata sektor bahari tersebar di seluruh pulau Indonesia. Nurisyah (dalam Rif'an, 2018) mengungkapkan mengenai wisata bahari yang merupakan bentuk pariwisata dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi lingkungan pesisir dan laut, baik melalui aktivitas langsung, seperti memancing, berenang dan menyelam maupun melalui aktivitas tidak langsung, seperti menikmati pemandangan dan suasana laut. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata pantai dan menjadi pendukung kegiatan ekonomi dalam menunjang pendapatan negara.

Pariwisata pantai mengutamakan pada pemandangan alam, keunikan yang ada pada pantai dan ekosistem yang dikombinasikan dengan ciri khas budaya serta karakter masyarakat sebagai keunggulan tersendiri (Muawanah, dkk., 2020). Daerah yang berhasil mengembangkan pariwisata pantai, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keindahan Pantai Wediombo (Rif'an, 2018), Blitar dengan pengelolaan Pantai Serang (Syahputra, 2020) dan pariwisata bahari Watukarung Kabupaten Pacitan (Sayogi, 2017). Sektor wisata bahari berperan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah sebagai *leading sector*. Pariwisata pantai memiliki kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (Ningsih, dkk., 2022).

Salah satu provinsi yang menawarkan wisata yang beragam adalah Provinsi Jawa Tengah, letaknya strategis karena berada di daratan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Jawa Barat pada bagian Barat, Jawa Timur pada sisi timur, Laut Jawa pada sisi utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Samudera Hindia pada sisi selatan. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 34.548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa (Mustofa dan Haryati, 2018). Dengan keadaan topografi tersebut tidak heran jika Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang beragam jenis, khususnya potensi dalam pengembangan sektor pariwisata pantai yang ada di pantai utara (pantura) dan pantai selatan (pansel). Salah satu daerah di bagian selatan Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata pantai yang sangat menarik, yakni Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Kabupaten Purworejo memiliki potensi pariwisata khususnya wisata alam, budaya, religi dan kuliner dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung program otonomi daerah dalam bidang pariwisata. Letak geografis dari Kabupaten Purworejo dibatasi oleh Pegunungan Serayu Selatan yang berada di sebelah utara, Pegunungan Menoreh di sebelah timur, Kabupaten Kebumen di sebelah barat dan dataran rendah di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Oleh karena itu, bentuk geografis dari Kabupaten Purworejo yang beragam membuat kabupaten ini terdapat berbagai spot wisata, seperti wisata pantai, gunung, dan air terjun. Keunikan pantai di Kabupaten Purworejo terletak pada garis pantai yang membentang dari timur ke barat dengan jenis tanah berpasir kehitam-hitaman. Salah satu pariwisata pantai yang potensial di Kabupaten Purworejo adalah Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

Pantai Dewa Ruci Jatimalang memiliki kondisi pantai yang baik dengan pemandangan yang indah. Pantai Dewa Ruci Jatimalang merupakan salah satu dari 4 prioritas yang di-*branding* akan dua hal, yakni kuliner dan tempat penyelenggaraan *event* skala nasional (diakses pada 4 Januari melalui <https://setda.purworejokab.go.id>). Strategi pengembangan kepariwisataan diperlukan untuk mempercepat pengembangan pariwisata. Sesuai RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki program peningkatan daya tarik destinasi untuk mendukung program unggulan Dolan Purworejo.

Salah satu fokus pengembangan pariwisata Kabupaten Purworejo dalam RPJMD 2021-2026 adalah rencana implementasi pengembangan destinasi pariwisata berkelas internasional dengan adanya *sand track*, pacuan kuda, lari pantai, voli pantai, akuarium dan layang-layang di Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Pantai Dewa Ruci Jatimalang yang berada di Kecamatan Purwodadi merupakan salah satu pantai yang memiliki potensi bahari. Pada 2001-2005 dilaksanakan pembangunan kawasan Kabupaten Purworejo dalam proyek *masterplan* yang disebut Kawasan Bahari Terpadu (KBT) (Yovita, dkk., 2015). Infrastruktur pantai dibangun di sepanjang pantai Dewa Ruci sehingga akses dan fasilitas pantai sudah tersedia. Dalam hal ini, Pantai Dewa Ruci merupakan perwujudan dari pembangunan sektor wisata bahari di Pantai Selatan Pulau Jawa dalam program KBT.

Pantai Dewa Ruci yang terletak di Desa Jatimalang nampak memiliki masalah sebagai daerah tujuan wisata. Pengembangan kawasan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang belum terlaksana dengan baik yang tercermin dari infrastruktur pendukung pariwisata yang belum memadai serta dukungan aktivitas masyarakat terhadap sektor pariwisata yang masih minim (Setiawan, 2015). Selain itu, pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang masih menemui berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, terutama minimnya transportasi umum untuk mendukung akses menuju objek wisata, keterbatasan sumber daya dalam pengembangan pariwisata. Kegiatan promosi dengan pemanfaatan teknologi masih belum dilakukan karena masyarakat belum bisa memanfaatkan media sosial atau *website* secara berkelanjutan. Komunikasi antara

pedagang, masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya menjaga lingkungan serta pemanfaatan pengelolaan pariwisata berkelanjutan masih kurang efektif sehingga kesadaran masyarakat akan pengembangan dan pengelolaan pariwisata masih rendah (Yovita, dkk., 2015). Kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan asing pada Pantai Dewa Ruci Jatimalang dapat dilihat pada Tabel 1.1, berikut informasi mengenai data kunjungan wisatawan pada pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang :

Tabel 1.1
Data Kunjungan Wisatawan Pariwisata Pantai Dewa Ruci
Jatimalang Tahun 2016-2021

No	Tahun	Wisatawan Asing	Wisatawan Lokal	Jumlah
1.	2016	-	156.230	156.230
2.	2017	7	132.757	132.764
3.	2018	32	144.998	145.030
4.	2019	-	143.400	143.400
5.	2020	21	181.564	181.585
6.	2021	-	166.956	166.956

Sumber : Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Purworejo

Pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kabupaten Purworejo merupakan salah satu penggerak sektor kepariwisataan yang membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah maupun dari pihak swasta untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengembangan Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Berdasarkan

tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memiliki fungsi dan tugas dalam menetapkan kebijakan terkait pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Daya tarik dalam objek wisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang merupakan modal dasar untuk dapat ditingkatkan dan dikembangkan karena hal tersebut menjadi alasan utama para wisatawan untuk mengunjungi objek wisata tersebut.

Keputusan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata bermula dari keinginan untuk mengapresiasi keindahan suatu objek pariwisata sehingga industri pariwisata harus dikelola dan dikembangkan bersama-sama oleh berbagai pihak atau bersifat *collaborative governance*. *Collaborative governance* menurut Ansell and Gash (dalam Arrozaaq, 2016) merupakan model baru dari strategi pemerintah yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholders* untuk bekerja sama dalam satu forum dan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang tidak dapat dihadapi oleh pemerintah. Kolaborasi menurut Ansell dan Gash merupakan bentuk tata kelola pemerintahan organisasi publik bekerja sama langsung dengan organisasi non pemerintah baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan untuk mencapai tujuan bersama (Masyhuri, dkk., 2021). Menurut Cordery, tata kelola kolaboratif merupakan suatu proses berbagai pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif dalam mengelola dan memajukan kepentingan masing-masing dalam mencapai tujuan bersama (Santoso & Djumiarti, 2020). Konsep tata kelola kolaboratif merupakan suatu alternatif yang dianggap mampu mempercepat dan mengimplementasikan pengembangan kawasan pariwisata.

Berbagai pemangku kepentingan seharusnya melakukan kerja sama melalui tahapan-tahapan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang baik di kawasan Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Terlebih di era globalisasi saat ini, daerah harus mampu bersaing untuk memikat wisatawan, investor, dan pemangku kepentingan lain guna meningkatkan pendapatan asli daerah (Santoso & Djumiarti, 2020). Dalam konteks ini, penting bagi daerah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menarik perhatian dan kepercayaan para pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan kemudahan akses, peningkatan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, serta peningkatan pemasaran dan promosi yang tepat sasaran sehingga daerah dapat memperkuat daya tariknya sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang kolaborasi dalam pengembangan pariwisata oleh Sinaga (2021) menjelaskan mengenai pengembangan pariwisata dibutuhkan pengelolaan kolaboratif karena pariwisata memiliki karakteristik multidimensi. Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2020) di Pantai Serang Kabupaten Blitar juga menjelaskan bahwa dengan *collaborative governance* dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Silayar (2021) tentang kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Sula. Belum terdapat penelitian tentang *collaborative governance* pada Pantai Dewa Ruci Jatimalang ini, melainkan baru

terdapat penelitian tentang pengembangan potensi wisata bahari dan optimalisasi wisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang melalui penelitian yang berjudul “Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana kriteria keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.
2. Menganalisis kriteria keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menambah wawasan, khususnya dalam menambah pengetahuan mengenai analisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
- c. Diharapkan juga dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya baik di bidang Administrasi Publik maupun di luar bidang Administrasi Publik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan berharga bagi pemerintah, baik pemerintah daerah Kabupaten Purworejo secara khusus, pemerintah daerah lain, maupun lembaga-lembaga yang membutuhkan untuk dijadikan acuan pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata yang efektif dan efisien.
- b. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata serta hasil yang telah dicapai sehingga dapat dipakai sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam menentukan efektivitas kebijakan.

- c. Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman dan menemukan pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
- d. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang relevan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pemahaman landasan teori dalam mengkaji penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa referensi penelitian yang relevan sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap bahan kajian dalam penelitian.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

<i>Collaborative Governance</i>			
No	Peneliti/ tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Mashudi, M., & Fauziah, L. memiliki topik tentang pengembangan destinasi pariwisata dalam perspektif <i>collaborative governance</i> . (2019)	Untuk mengetahui formulasi, <i>collaborative governance</i> dan faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Pematang.	Pengembangan pariwisata sudah dilaksanakan, tetapi masih perlu ditingkatkan. Pengembangan tujuan wisata dengan <i>Collaborative governance</i> belum dapat berjalan optimal karena terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

2.	Syahputra, K. A., & Ma'ruf, M. F. memiliki topik tentang <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan pantai. (2020)	Untuk mengetahui pendekatan <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan wisata pantai Serang di Kabupaten Blitar.	Masih terjadi tumpang tindih antar pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi sehingga menghambat proses pengelolaan wisata Pantai Serang.
3.	Muawanah, dkk., memiliki topik tentang peran dan kepentingan <i>stakeholder</i> dalam pengembangan pariwisata bahari. (2020)	Untuk mengetahui minat dan peran <i>stakeholder</i> serta evaluasi peraturan di tingkat nasional dan daerah dalam kemajuan pengembangan wisata bahari.	Menunjukkan bahwa pengembangan wisata bahari di Malaumkarta merupakan hasil dari keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Loka Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten Sorong serta Dewan "Adat" dan Lembaga Adat.
4.	Sinaga, Irene Camelyn. memiliki fokus tentang kolaborasi pengembangan pariwisata. (2021)	Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata di Sumatera Selatan.	Pengembangan pariwisata belum seutuhnya melaksanakan tata kelola kolaboratif karena belum terbentuk kepercayaan antar masing-masing aktor yang terlibat.
5.	Santoso, R. S., & Djumiarti, T. memiliki topik tentang tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata Kawasan Sangiran. (2020)	Untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di kawasan Sangiran.	Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di kawasan Sangiran adalah pemerintah (Lembaga Adat), masyarakat (LSM) dan sektor swasta. Keseimbangan posisi dalam kolaborasi belum berjalan dengan baik karena minimnya peran swasta.

6.	Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. memiliki fokus tentang kolaborasi pengembangan desa wisata. (2021)	Untuk menganalisis <i>collaborative governance</i> dan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan Desa Wisata Kemetul.	<i>Collaborative governance</i> menemui banyak kendala, seperti aturan yang tidak tegas, pemahaman visi dan misi bersama, komitmen dan partisipasi yang terbatas. Faktor keberhasilan yang mempengaruhi kolaborasi, yakni kuatnya kepercayaan, terdapat aturan, terdapat pembagian tanggungjawab dan informasi dan tersedianya sumber daya. Indikator yang belum terpenuhi dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul meliputi struktur jaringan, komitmen dan kejelasan tata kelola.
7.	Silayar, K. memiliki topik tentang kolaborasi pengembangan pariwisata. (2021)	Untuk mengidentifikasi <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Sula.	Konsep <i>collaborative governance</i> terdiri atas delapan dimensi, yaitu: (1) <i>network structure</i> ; (2) <i>Commitment to a common purpose</i> ; (3) <i>trust among the participants</i> ; (4) <i>Governance</i> ; (5) <i>Access to authority</i> ; (6) <i>Distributive accountability/responsibility</i> ; (7) <i>Information sharing</i> ; (8) <i>Access to resources</i> .
8.	Diani & Simbolon. Memiliki topik tentang tata kelola kolaboratif pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata Lava <i>Tour Merapi</i> . (2017)	Untuk menganalisis bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pariwisata Lava <i>Tour Merapi</i> .	Tata kelola kolaboratif yang dilakukan antara pemerintah, masyarakat dan swasta berbentuk <i>partnership</i> .
9.	Hakim, et al. membahas tentang keterlibatan	Untuk menganalisis tata kelola kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat	Proses kolaboratif (dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap kolaborasi, pemahaman bersama dan hasil

	tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pengelolaan Jogja <i>Exotarioum</i> . (2019)	yang dilakukan dalam pengelolaan Jogja <i>Exotarioum</i> yang merupakan taman wisata edukasi satwa.	sementara) sudah berjalan baik, namun pada awal pelaksanaannya merugikan pemerintah karena peran pemerintah dibatasi dan tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Pengelolaan pariwisata Jogja <i>Exotarioum</i> terdapat pembagian peran, pemerintah sebagai kontrol pengelola wisata, masyarakat sebagai pegawai dan swasta sebagai pengelola wisata.
10.	Kwiatkowski, dkk., membahas tentang tata kelola kolaboratif di Wadden <i>Sea National Park</i> Denmark (2020).	Untuk mengidentifikasi struktur kolaboratif dan partisipatif yang lebih luas.	Penduduk lokal memiliki minat yang besar dalam keterlibatan pariwisata Wadden <i>Sea National Park</i> . Keterlibatan penduduk lokal dan relawan dalam pemeliharaan fasilitas dan lingkungan yang selaras dengan tujuan perlindungan taman nasional.
Pengembangan Pariwisata			
11.	Yovita, F. I., Purwanti, F., & Suprpto, D. memiliki topik pengembangan potensi wisata bahari. (2015)	Untuk mengidentifikasi potensi pariwisata serta mengetahui pemahaman aparat pemerintahan, masyarakat dan pengunjung sebagai upaya penyusunan strategi pengembangan Desa Wisata Jatimalang.	Potensi wisata Desa Jatimalang adalah wisata kuliner dan keindahan alam. Aspirasi mengarah terhadap kebersihan, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah serta peningkatan fasilitas di sekitar pantai. Strategi pengembangan Desa Wisata Jatimalang mencakup peningkatan komunikasi antara masyarakat, pedagang dengan pemerintah, sosialisasi melindungi dan melestasikan lingkungan, serta sosialisasi meningkatkan kesadaran pemanfaatan dan pengelolaan daerah wisata.
12.	Hertanto, H. B. memiliki fokus tentang pengembangan ekowisata	Untuk mengidentifikasi potensi wisata dan arah kebijakan pengembangan ekowisata kawasan	Terdapat tiga objek ekowisata dengan kombinasi potensi rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan analisis potensi dan arah kebijakan, objek wisata

	karst. (2021)	karst Pacitan.	pantai Srau, Cua Gong, dan Gua Tabuhan memiliki potensi tertinggi untuk dikembangkan dengan menggunakan konsep 3-E (Ekologi, Edukasi, dan Ekonomi), pengembangan ekowisata berbasis masyarakat lokal, dan pengembangan ekowisata berbasis interpretasi.
13.	Saluja, et al. memiliki topik yang membahas tentang kegiatan pariwisata yang dapat mempengaruhi masyarakat di Kerala. (2022)	Untuk mengidentifikasi dampak dari pengembangan pariwisata Tebing Varkala di Kerala bagi masyarakat sekitar.	Kegiatan pengembangan pariwisata Tebing Varkala berdampak positif bagi masyarakat sekitar karena membuka lapangan pekerjaan, tetapi pengelola pariwisata belum melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan pariwisata.
14.	Benedetto, et al. memiliki topik tentang pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Taman Nasional Asinara, Italia. (2016)	Untuk mengidentifikasi pentingnya tata kelola kolaboratif berkelanjutan dalam pengelolaan taman nasional.	Tata kelola kolaboratif yang terstruktur antar pemangku kepentingan dapat menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan menjadi penggerak bagi perekonomian lingkungan sekitar.
15.	Keyim, P. membahas mengenai pengembangan pariwisata potensial di pedesaan Vuonislanti, Finlandia (2018)	Untuk mengidentifikasi kendala dalam pendekatan kolaborasi pariwisata masyarakat.	Pendekatan kolaborasi masih menemui berbagai macam kendala yang berakar dari aturan sosial dan ekonomi. Pendekatan kolaborasi yang adil dan efektif dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal Vuonislanti, Finlandia.

Sumber : Diolah oleh penulis, 2023.

Berdasarkan Tabel 1.2, menunjukkan bahwa terdapat banyak kajian yang membahas mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata. *Collaborative governance* banyak digunakan sebagai cara untuk melakukan pengembangan pariwisata. Di bawah ini akan diruakan mengenai penelitian terdahulu sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sula yang menggunakan *collaborative governance* sebagai strategi dalam mengembangkan pariwisatanya. Pengembangan pariwisata di Kepulauan Sula melibatkan Dinas Pariwisata Kepulauan Sula, pengusaha pariwisata, dan masyarakat (Silayar, 2021). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana & Simbolon (2017) yang membahas tentang pengelolaan pariwisata Lava *Tour* Merapi dengan melibatkan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Djumiarti (2020) tentang *collaborative governance* pengembangan pariwisata Kawasan Sangiran yang telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Sragen, tetapi hubungan kolaborasi hubungan antar aktor dan pembagian tugas peran masing-masing aktor belum ditentukan dengan tujuan yang jelas. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk. (2021) bahwa kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul sudah terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2021) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata belum seutuhnya melaksanakan tata kelola kolaboratif karena belum terbentuk kepercayaan antar masing-masing aktor yang terlibat.

Berbeda dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Benedetto et al. (2016) yang membahas tentang tata kelola kolaboratif yang terstruktur akan menciptakan sebuah pariwisata yang berkelanjutan dan menjadi penggerak ekonomi bagi lingkungan sekitar.

1.5.2 Administrasi Publik

Pergeseran istilah administrasi negara menjadi administrasi publik menjadikan makna administrasi menjadi lebih luas. Administrasi negara menekankan pada aspek negara dan kekuasaan negara, sedangkan administrasi publik menekankan pada aspek publik atau masyarakat, aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta aspek pelayanan (Astuti, dkk., 2020:26). Administrasi publik terdiri dari dua kata, yakni administrasi dan publik. Menurut Dimock & Dimock (dalam Pasolong, 2014:2) menyatakan administrasi berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang berarti melayani sehingga administrasi merupakan sebuah proses pelayanan. Siagian (dalam Pasolong, 2014:3) menjelaskan bahwa administrasi merupakan proses kerja sama yang melibatkan dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Publik dapat diartikan umum, masyarakat luas atau negara, namun publik juga mengacu kepada mereka yang bekerja untuk masyarakat (Keban, 2014:4).

Administrasi publik menurut Chander dan Plano (dalam Keban, 2014:3) adalah proses mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya dan personel publik untuk memformulasikan, mengelola, dan mengimplementasikan berbagai keputusan dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, administrasi publik memiliki tujuan untuk pemecahan masalah-masalah publik dengan melakukan perbaikan

dan penyempurnaan khususnya dalam bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014:8) menjelaskan administrasi publik sebagai gabungan antara teori dan praktik yang kompleks dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah kepada masyarakat dan mendorong kebijakan publik untuk menanggapi kebutuhan sosial dengan lebih baik. Maksud tersebut dapat dipahami bahwa administrasi publik memiliki nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan pemenuhan kebutuhan sosial sebagai upaya dalam melembagakan praktik-praktiknya. Administrasi publik menurut Ibrahim (dalam Revida, dkk., 2020:3) adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan meliputi manajemen pemerintahan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan yang didukung oleh mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah koordinasi yang dilakukan sekelompok individu maupun lembaga pemerintah guna memberikan pelayanan publik dan pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Keterkaitan administrasi publik dengan penelitian yang dilakukan adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai upaya pemecahan masalah dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

1.5.3 Manajemen Publik

Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014:92) mengartikan manajemen sebagai kegiatan yang dilakukan pada organisasi tertentu sebagai serangkaian keterampilan dan tugas. Manajemen publik juga disebut secara khusus sebagai

manajemen instansi pemerintah. Wilson (dalam Keban, 2014:100) menjelaskan bahwa manajemen publik memilih pemerintah sebagai badan utama organisasi, menempatkan fokus utama pada fungsi eksekutif, mencari prinsip dan teknik manajemen untuk pengembangan kemampuan administrasi yang lebih efektif dan metode komparatif sebagai suatu metode untuk mengembangkan administrasi publik. Manajemen publik adalah rangkaian proses dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya pada organisasi (Tilano dan Suwitri, 2019).

Perkembangan zaman yang pesat menyebabkan paradigma manajemen publik mengalami perubahan dari yang awalnya *Old Public Administration* (OPA) berkembang menjadi *New Public Management* (NPM) sehingga menyebabkan perubahan dalam penyebutan *government* menjadi *governance* serta muncul istilah baru tentang *collaborative governance*, sebagai proses pengambilan keputusan dan upaya penyelesaian permasalahan publik dengan melibatkan pihak ketiga selain lembaga pemerintah, yaitu *Non Governmental Organization* (NGO) atau kelompok kepentingan masyarakat (Tilano dan Suwitri, 2019). Paradigma yang terakhir berkembang ke arah *New Public Service* (NPS) yang mengesampingkan pasar, persaingan dan pelanggan akan tetapi lebih diarahkan pada demokrasi, kebanggaan dan kewarganegaraan serta memiliki orientasi pada kualitas pelayanan publik (Pasolong, 2014:35). Keterkaitan hal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan *collaborative governance*

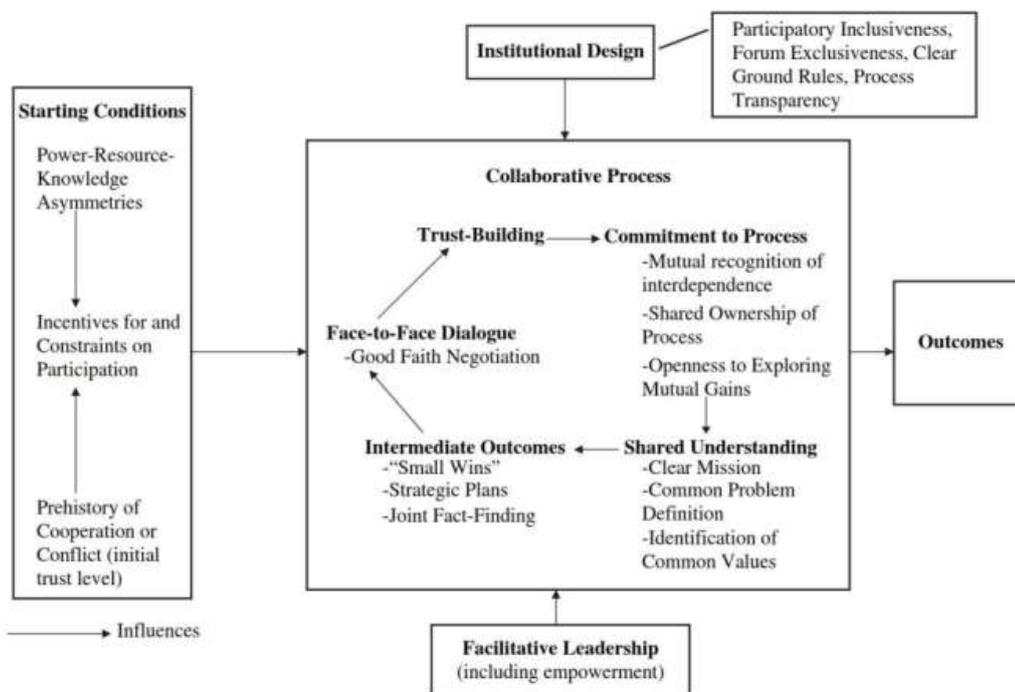
dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan non pemerintah atau NGO sebagai upaya dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

1.5.4 Collaborative Governance

Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif menurut Cordery merupakan proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk kepentingan masing-masing lembaga dan mencapai tujuan bersama (Santoso dan Djumiarti, 2020). Menurut Emerson (dalam Mashudi & Fauziah, 2019), *collaborative governance* diartikan sebagai proses dalam pembuatan kebijakan publik dan manajemen pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat dari berbagai institusi dan tingkatan untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual. Morse dan Stephens (dalam Syahputra, 2020) menerangkan bahwa terdapat empat tahapan dalam *collaborative governance*, yakni (1) *Assessment* (penilaian), (2) *Initiation* (inisiasi), (3) *Delibration* (musyawarah) dan (4) *Implementation* (implementasi).

Menurut Ansell dan Gash (Astuti, dkk., 2020:134), *collaborative governance* adalah suatu metode pengelolaan pemerintahan yang melibatkan langsung pemangku kepentingan di luar instansi pemerintah, yang memiliki orientasi musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan dengan tujuan melaksanakan program dan kebijakan publik. Berikut merupakan bagan yang menunjukkan model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash :

Gambar 1.1
Model Collaborative governance Ansell dan Gash



Sumber : Ansell dan Gash (Astuti,dkk., 2020:76)

Menurut Ansell dan Gash (dalam Astuti,dkk., 2020:76), terdapat empat aspek dalam *collaborative governance*, yaitu :

1. Kondisi Awal

Kondisi awal proses kolaborasi dapat mendukung atau menghambat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Terdapat tiga aspek dalam kondisi awal ini, yaitu ketimpangan kekuasaan/ pengaruh pemangku kepentingan, pengetahuan, sumber daya, sejarah berupa kerja sama atau konflik antar pemangku kepentingan, dorongan dan hambatan partisipasi dalam kolaborasi.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik, ketidapercayaan antar pemangku kepentingan dan memberikan bimbingan kepada para pemangku kepentingan. Kolaborasi lebih mungkin berhasil dengan kepemimpinan yang dipercaya dan dihormati oleh seluruh pemangku kepentingan.

3. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan berkaitan pada prinsip dasar atau aturan dasar yang sangat penting karena menjadi legitimasi dalam proses kolaborasi. Desain kelembagaan menekankan pada aturan berpartisipasi dalam kolaborasi, pembentukan forum, kejelasan aturan pelaksanaan kolaborasi dan transparansi dalam proses kolaborasi.

4. Proses Kolaboratif

a. Dialog tatap muka

Kolaborasi dibangun atas dasar dialog tatap muka antar pemangku kepentingan guna mencapai kesepakatan bersama. Dialog antar pemangku kepentingan juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang untuk dapat bekerja sama dengan saling menguntungkan.

b. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan proses dari dialog. Membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan komitmen yang tinggi sehingga peran dari para pemimpin kolaborasi juga sangat dibutuhkan.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi

Komitmen dalam proses kolaborasi adalah keadaan saling ketergantungan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi dan cenderung menumbuhkan komitmen karena kolaborasi adalah proses kerja sama yang berkesinambungan dan saling menguntungkan.

d. Pemahaman bersama

Pemangku kepentingan harus berusaha untuk membangun pemahaman bersama tentang tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Pemahaman bersama dapat mencakup identifikasi yang jelas tentang permasalahan bersama, tujuan kolaborasi yang jelas dan pemahaman bersama tentang nilai-nilai yang ingin dicapai dalam kolaborasi.

e. Hasil sementara

Hasil sementara merupakan hasil dari proses kolaboratif yang dapat dirasakan langsung dan bisa berdampak bagi kelanjutan kolaborasi. Hasil sementara dapat mendorong kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

Collaborative governance memiliki fokus mengenai kebijakan dan permasalahan publik. Lembaga publik memiliki kecenderungan besar dalam penyusunan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi untuk mencapai kesepakatan bersama di antara para pemangku kepentingan. Kolaborasi menghendaki terciptanya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Astuti,dkk., 2020:41). Fosler (dalam Diani dan Simbolon, 2017) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan kerja sama intensif yang melibatkan

beberapa pihak, termasuk upaya sadar untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, strategi dan sumberdaya. Pada dasarnya pihak-pihak yang melakukan kerja sama memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk membangun kesamaan visi dan berupaya untuk mewujudkan bersama-sama. Selanjutnya, Edward DeSeve (dalam Silayar, 2021) menyebutkan terdapat delapan hal penting yang dapat dijadikan kriteria keberhasilan *collaborative governance*, yaitu :

- 1) *Network structure*
 - a. Keterkaitan antar pemangku kepentingan
 - b. Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat
- 2) *Commitment to a common purpose*
 - a. Tujuan bersama
 - b. Kesamaan pemikiran
- 3) *Trust among the participants*
 - a. Kepercayaan antar pemangku kepentingan
 - b. Keterbukaan informasi
- 4) *Governance*
 - a. Kejelasan tata kelola
 - b. partisipasi
- 5) *Acces to authority*
 - a. Hak yang sama terhadap akses kekuasaan
 - b. Proses penyampaian keluhan

6) *Distributive accountability*

- a. Pembagian peran dan tanggung jawab
- b. Pengelolaan

7) *Information sharing*

- a. Kepercayaan antar *stakeholders*
- b. Tidak terbatasnya informasi

8) *Acces to resource*

- a. Sumber daya manusia
- b. Sumber daya keuangan

1.5.5 Pariwisata

1.5.5.1 Definisi Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu “pari” dan “wisata”. “Pari” memiliki makna keseluruhan, sedangkan “wisata” memiliki makna perjalanan. Oleh karena itu, pariwisata merupakan keseluruhan perjalanan dari berangkat dan singgah di suatu tempat hingga kembali ke tempat asal (Kawengian dan Pombengi, 2018). Pariwisata menurut Mathiesson dan Waill (dalam Nawawi, 2013) adalah pergerakan manusia yang bersifat sementara menuju tujuan wisata di luar tempat tinggal dan aktivitas di tempat tujuan wisata disediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Maksud dari pengertian tersebut adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang yang melakukan perjalanan dengan cara berpergian dan singgah sementara di luar lingkungan tempat tinggal guna berlibur, bisnis dan urusan lain.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang sudah mendunia. Di dalam undang-undang tersebut, tertulis bahwa :

- a. Wisata merupakan perjalanan sementara yang dilakukan individu atau kelompok individu mengunjungi tujuan tertentu untuk rekreasi, pengembangan diri dan mempelajari keunikan wisata.
- b. Wisatawan merupakan individu atau kelompok individu yang melakukan aktivitas wisata.
- c. Pariwisata merupakan aktivitas wisata yang didukung pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah.
- d. Kepariwisataan merupakan keseluruhan aktivitas wisata yang memiliki sifat multidimensi dan multidisiplin dari kebutuhan seseorang dan interaksi antara wisatawan, swasta, pemerintah.
- e. Daya tarik wisata merupakan sesuatu keunikan dan keindahan berupa keanekaragaman alam, budaya dan buatan manusia yang menjadi tujuan wisata.
- f. Daerah tujuan pariwisata merupakan suatu wilayah geografis yang melengkapi penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan seperti terdapat daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum dan masyarakat yang saling terkait.
- g. Usaha pariwisata memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan barang atau jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wisatawan.
- h. Pengusaha pariwisata merupakan individu atau sekumpulan individu yang melakukan aktivitas dalam industri pariwisata.

1.5.5.2 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah upaya terencana dan terstruktur untuk membenahi kawasan wisata yang sudah ada dan membangun destinasi baru dalam kawasan wisata untuk dipasarkan kepada calon wisatawan (Sutiarso, 2018). Wardhani dan Valeriani (2016) menjelaskan pengembangan pariwisata merupakan rangkaian upaya dalam mewujudkan keterpaduan pemanfaatan sumber daya pariwisata dan memadukan seluruh aspek non kepariwisataan yang berkaitan pada pengembangan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yoeti (dalam Rudin, 2021) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu lokasi wisata dalam upaya tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada *attraction*, *amenities* dan *accessibility*.

1. *Attraction* (daya tarik)

Daya tarik pariwisata merupakan segala sesuatu yang mempunyai keunikan dan beranekaragam kekayaan alam, budaya dan buatan manusia yang menjadi destinasi wisata. Daya tarik wisata yang baik secara efektif dapat mendatangkan wisatawan dan membuat wisatawan tidak bosan selama berada di tempat wisata sehingga membuat wisatawan berkunjung kembali.

2. *Amenities* (kenyamanan)

Keberlangsungan kegiatan wisata juga harus menyajikan pelayanan yang baik, keramahan, dimanjakan dengan pemandangan yang unik dan indah, serta tempat yang nyaman dan bersih.

3. *Accessibility* (akses menuju tempat wisata)

Aksesibilitas menjadi unsur penting dalam pengembangan pariwisata karena sebagai akses wisatawan dalam menjangkau destinasi pariwisata.

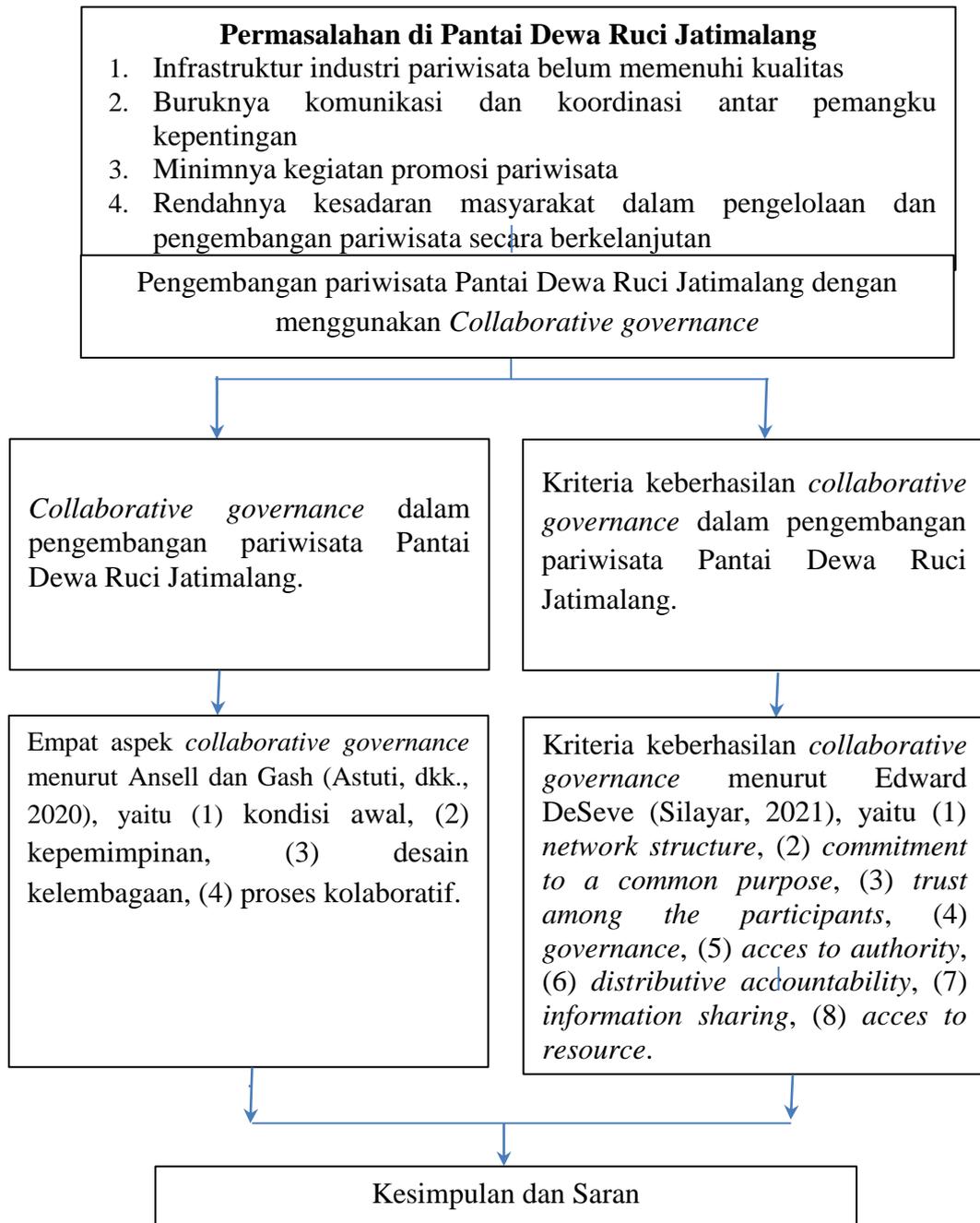
1.5.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta berhubungan dengan perumusan masalah. Untuk mendapatkan sebuah kerangka berpikir dan pemahaman mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo diperlukan teori dasar atau konsep sebagai acuan arah penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini, adalah pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang masih menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya karena minimnya transportasi untuk mendukung akses menuju objek wisata, keterbatasan sumber daya dalam pengembangan pariwisata buruknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pedagang dan masyarakat serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, peneliti ingin menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan menganalisis kriteria keberhasilannya. Teori dasar atau konsep yang digunakan peneliti untuk menganalisis pertanyaan penelitian menggunakan konsep *collaborative governance*. Teori *collaborative governance* merupakan konsep untuk

menganalisis proses *collaborative governance* dan kriteria keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Model *collaborative governance* memiliki empat aspek, yaitu kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan dan proses kolaboratif. Dalam mencapai keberhasilan dalam *collaborative governance* terdapat delapan indikator yang menentukannya, yaitu (1) *network structure*, (2) *commitment to a common purpose*, (3) *trust among the participants*, (4) *governance*, (5) *access to authority*, (6) *distributive accountability*, (7) *information sharing*, (8) *access to resource*.

Gambar 1.2
Bagan Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2023.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Collaborative governance merupakan sebuah upaya untuk menyatukan semua sektor baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk menata, mengatur dan mengelola urusan bersama guna mendapatkan hasil yang optimal, efektif dan efisien. Pariwisata merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan yang memiliki tujuan untuk bersenang-senang mencari hiburan, melepas penat dan suasana baru pada lokasi tertentu yang ada di luar lingkungan daerah sehari-hari dalam jangka waktu tertentu. Peran penting dalam pengembangan pariwisata tidak hanya terletak pada peran pemerintah pusat maupun daerah saja, tetapi juga peran seluruh pemangku kepentingan yang terlibat termasuk masyarakat atau dengan istilah terwujudnya *collaborative governance*. Berdasarkan alat penelitian dan teori yang digunakan maka fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Dalam menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* terdapat empat tahapan menurut Ansell dan Gash (Astuti, dkk., 2020:76) yang dapat dilihat, yaitu :
 - 1) Kondisi awal
 - a. Kepentingan dan visi bersama para pemangku kepentingan
 - b. Dorongan partisipasi dalam kolaborasi
 - 2) Kepemimpinan
 - a. Pemecahan masalah dalam pengembangan pariwisata
 - b. Memberikan bimbingan kepada para pemangku kepentingan

- 3) Desain kelembagaan
 - a. Penetapan aturan dasar
 - b. Transparansi dalam kolaborasi
- 4) Proses kolaboratif
 - a. Dialog tatap muka
 - b. Membangun kepercayaan
 - c. Komitmen terhadap proses
 - d. Pemahaman bersama
 - e. Hasil sementara

2. Menganalisis kriteria keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Dalam menganalisis kriteria keberhasilan menurut Edward DeSeve (Silayar, 2021), pelaksanaan *collaborative governance* dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.3
Kriteria Keberhasilan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata

No	Aspek	Indikator
1.	<i>Network structure</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Keterkaitan antar pemangku kepentingan b. Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat
2.	<i>Commitment to a common purpose</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan bersama b. Kesamaan pemikiran

3.	<i>Trust among the participants</i>	a. Kepercayaan antar pemangku kepentingan b. Keterbukaan informasi
4.	<i>Governance</i>	a. Kejelasan tata kelola b. Partisipasi
5.	<i>Acces to authority</i>	a. Hak yang sama terhadap akses kekuasaan b. Proses penyampaian keluhan
6.	<i>Distributive accountability/responsibility</i>	a. Pembagian peran dan tanggung jawab b. Pengelolaan
7.	<i>Information sharing</i>	a. Kepercayaan antarstakeholder b. Tidak terbatasnya informasi
8.	<i>Acces to resources</i>	a. SDM b. Sumber daya keuangan

Sumber : Diolah oleh penulis, 2023.

1.7 Argumen Penelitian

Pengembangan pariwisata di Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo menggunakan *collaborative governance* dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. *Collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (dalam Hardani, dkk., 2020:242) merupakan proses ilmiah untuk mengumpulkan informasi atau data apa adanya tanpa

mempengaruhinya sesuai dengan kegiatan dan tujuan tertentu. Metode penelitian kualitatif merupakan metode naturalistik dengan mempelajari kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen, menggunakan metode triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, analisis yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna (Sugiyono, 2015:1). Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi, fakta atau peristiwa secara akurat dan sistematis tentang sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani, dkk., 2020:54)

Penelitian kualitatif menghasilkan data dalam bentuk deskriptif seperti tulisan atau ucapan dan tingkah laku subjek dan objek yang diamati. Data yang akan menjadi acuan dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini ingin menggambarkan kondisi riil dengan menekankan pada pemaparan hasil temuan di lapangan dan menganalisis secara mendalam mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs dalam penelitian ini adalah lokus atau lokasi penelitian ini yang berada di Pantai Dewa Ruci Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Lokasi penelitian yang berada di Pantai Dewa Ruci Desa Jatimalang dipilih karena dianggap sebagai salah satu potensi pariwisata yang menarik dan unggul di Kabupaten Purworejo. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang baik dapat memberikan dampak positif pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, juga memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan akses dan relasi yang diperlukan dalam proses penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang memahami mengenai permasalahan yang diteliti dan juga memberikan informasi tentang situasi dan keadaan lingkungan penelitian (Moleong, 2010:132). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menentukan informan berdasarkan tujuan tertentu yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan data agar mendapatkan data yang tepat dan *snowball sampling* yang awal mula penentuan sampel kecil menjadi lebih besar atau berkembang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata, serta menganalisis kriteria keberhasilan dalam *collaborative governance*. Subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Desa Jatimalang
3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Ruci
4. Swasta (pelaku usaha)

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di Pantai Dewa Ruci Jatimalang menggunakan data berupa kata, tindakan, maupun pernyataan. Dalam penelitian ini juga mengumpulkan data yang tidak hanya tanggapan, tetapi secara fisik juga

dapat diamati, dicatat, dikategorikan berdasarkan lokasi dan waktu yang melatarbelakangi peristiwa.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2010:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata secara lisan yang dicatat oleh peneliti, kegiatan di lapangan yang diamati oleh peneliti, dan data pelengkap seperti dokumen dan sumber lain. Oleh karena itu, untuk melengkapi data penelitian di Pantai Dewa Ruci Jatimalang dibutuhkan dua sumber data, yakni :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari narasumber yang ada di lapangan. Penelitian ini memperoleh data primer yang bersumber dari hasil wawancara kepada informan berupa kata-kata dan pernyataan yang dilakukan kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian serta pengamatan di lapangan berkenaan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain atau sumber lain sebagai data penunjang bagi data primer berupa dokumen tertulis, arsip, informasi, pendapat dan lain lain yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan informasi dan data berupa fakta. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian karena merupakan instrumen pada proses pengumpulan informasi sebagai data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang relevan dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar data yang didapatkan dapat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi menurut Nugrahani (2014:132) merupakan metode untuk mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis aktivitas dan interaksi subjek penelitian. Observasi dilakukan pencatatan dan pengamatan langsung di Pantai Dewa Ruci Jatimalang untuk mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Observasi menghasilkan gambaran kejadian, aktivitas, objek dan kenyataan yang dicari dalam pengamatan langsung di kawasan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

b. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara menurut Nazir (dalam Hardani, dkk., 2020:138) merupakan proses memperoleh informasi untuk suatu keperluan penelitian yang menggunakan format tanya jawab antara pewawancara

dengan informan dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan informan atau narasumber yang dipilih memiliki wawasan atau informasi yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian, akan tetapi sesuai dengan prosedur dan pedoman wawancara yang telah disusun. Pertanyaan dalam wawancara tidak terstruktur disesuaikan dengan kondisi dan keunikan dari informan sehingga pertanyaan yang dihasilkan dapat menggali fakta-fakta dan informasi secara mendalam dan kebenaran informasi yang diberikan oleh narasumber atau informan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting sehingga mendapatkan data yang sah, lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan serta memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti (Basrowi dan Suwandi, 2008). Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini melalui aktivitas mencatat dengan melakukan pencatatan terhadap data yang telah tersedia atau data yang diperoleh. Dokumentasi tersebut berasal dari catatan penting, laporan, arsip, gambar dan artikel dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa maupun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Ruci.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menjadi aspek utama dalam suatu penelitian karena analisis data merupakan proses pengolahan dan penyusunan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi secara sistematis dengan mengklasifikasikan data ke dalam

kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, mengidentifikasi pola, pemilihan informasi yang penting dan penarikan kesimpulan yang mudah dipahami (Sugiyono, 2015:89). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Sugiyono (2015:92) mengungkapkan reduksi data adalah kegiatan memfokuskan pada hal-hal penting, merangkum, mencari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini adalah melakukan penyederhanaan dan pengelompokan data-data penting yang diperoleh sehingga menghasilkan informasi-informasi yang bermakna dan memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman (dalam Hardani, dkk., 2020:167) menjelaskan penyajian data merupakan sebuah proses mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang dikumpulkan sehingga memperoleh kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian data berbentuk teks naratif yang dilakukan secara sistematis dan mudah dimengerti dengan tujuan memudahkan pemahaman dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Hardani, dkk. (2020) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan merupakan catatan informasi terorganisir dengan menghasilkan simpulan dan pengambilan tindakan dari permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan

dilakukan dengan melihat dan menganalisis bukti-bukti pendukung yang valid sehingga memastikan bahwa proses penarikan kesimpulan tentang kesesuaian data dalam konsep dasar analisis menjadi tepat dan objektif.

Interpretasi data merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh makna yang lebih mendalam pada hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Interpretasi data dilakukan dengan peninjauan kembali hasil penelitian secara kritis dengan menggunakan teori yang relevan data data akurat yang didapatkan di lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan data yang kredibel atau penelitian yang bermutu. Oleh karena itu, uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas sebagai landasan nilai kebenaran sesuai dengan ketentuan yang digunakan sebagai syarat utama pemenuhan informasi serta data sehingga hasil penelitian dapat diterima oleh informan atau narasumber dan dapat dipercaya oleh pembaca. Teknik yang digunakan dalam menguji kualitas data adalah triangulasi. Teknik triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan berbagai sudut pandang. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:274) dibagi menjadi tiga jenis, antara lain :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan untuk pengujian keaslian dan kualitas data dengan cara melakukan pengecekan kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Jenis triangulasi

ini dapat membandingkan hasil observasi langsung di lapangan dengan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh melalui beberapa sumber, seperti Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Pemerintah Desa Jatimalang, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Ruci dan swasta/ pelaku usaha kuliner.

b. Triangulasi Teknis

Triangulasi teknis dilakukan dengan pengecekan kembali data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi teknis dalam penelitian ini menggunakan observasi kemudian dicek dengan wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih valid dan akurat.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan metode untuk menguji keabsahan data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber yang diperoleh dalam waktu berbeda. Triangulasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini berupaya untuk mendapatkan data yang valid melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan berulang-ulang sehingga data yang diperoleh kepastian data yang lebih valid.